

**PERAN ANGKATAN MUDA MUHAMMADIYAH (AMM)
DALAM PEMBANGUNAN SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR
KEPEMUDAAN**

(STUDI KASUS KNPI SULAWESI SELATAN 2019 – 2022)

***THE ROLE OF ANGKATAN MUDA MUHAMMADIYAH (AMM)
IN SUPRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND YOUTH
INFRASTRUCTURE***

(CASE STUDY KNPI SULAWESI SELATAN 2019 – 2022)

SOEMITRO EMIN PRAJA



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

**PERAN ANGKATAN MUDA MUHAMMADIYAH (AMM)
DALAM PEMBANGUNAN SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR
KEPEMUDAAN**

(STUDI KASUS KNPI SULAWESI SELATAN 2019 – 2022)

***THE ROLE OF ANGKATAN MUDA MUHAMMADIYAH (AMM)
IN SUPRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND YOUTH
INFRASTRUCTURE***

(CASE STUDY KNPI SULAWESI SELATAN 2019 – 2022)

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Manajemen Kepemimpinan Pemuda

Disusun dan diajukan oleh

SOEMITRO EMIN PRAJA

Kepada

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PERAN ANGKATAN MUDA MUHAMMADIYAH (AMM) DALAM PEMBANGUNAN SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR KEPEMUDAAN (STUDI KASUS KNPI SULAWESI SELATAN 2019 – 2022)

Disusun dan diajukan oleh

SOEMITRO EMIN PRAJA

P022181029

Telah di pertahankan di hadapan Panitia Ujian Yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 22 Desember 2020
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Anggota



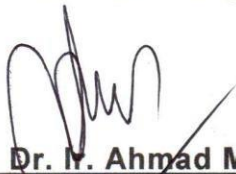
Dr. Abdul Razak Munir, SE., M.Si., Mktg
NIP. 197412062000121001



Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si
NIP. 197901062005011001

Ketua Program Studi.
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng
NIP.196207271989031003



Prof. Dr. H. Jamaluddin Jompa, M.Sc
NIP.19670308 1990031001

Pernyataan Keaslian Tesis

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soemitro Emin Praja
Nomor Mahasiswa : P022181029
Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
/ Manajemen Kepemimpinan Pemudaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Makassar, 12 November 2020

Yang Menyatakan,

Soemitro Emin Praja



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai suri teladan yang baik bagi umat manusia dan membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan dengan bangga mempersembahkan karya penulisan ilmiah ini kepada orangtua tercinta, Ibunda **Hj. Palatiknok** dan Ayahanda (**alm**) **Drs. H. Usman. P** yang penuh kasih sayang mendidik, membesarkan dan selalu memberikan penulis nasehat, perhatian, serta do'a restu dan rasa cintanya yang begitu berlimpah untuk anaknya ini.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda **Dr. Abdul Razak Munir, SE., M.Si., Mktg** selaku komisi penasehat I dan Ayahanda **Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si** selaku komisi penasehat II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah dan rahmat-Nya.

Selain itu, dengan terselesaikannya tesis ini tidak terlepas pula dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan banyak rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda Prof. Dr. Jamaludin Jompa, M.Sc, selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng, selaku Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai instansi yang telah memberikan Beasiswa kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Bapak / Ibu Dosen Perencanaan dan Pengembangan Wilayah / Manajemen Kepemimpinan Pemuda yang telah membimbing, mendidik, memberikan pengetahuan dan nasehat-nasehat dan juga segenap pegawai dilingkup Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan terbaik dan kelancaran administrasi selama perkuliahan.
4. Informan yang telah meluangkan waktu dan membantu proses penyelesaian tugas akhir penulis.
5. Saudara kandung tercinta **Sulipno Pratomo S.H, dll** serta keluarga besar yang telah memberikan dorongan serta bantuan moril maupun spiritual.

6. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, DPD KNPI Sulawesi selatan, Himaprodi Pendidikan Bahasa Inggris Unismuh Makassar, dan Kerukunan Pelajar dan Mahasiswa Ara – Lembanna yang telah banyak membantu penulis.
7. Rekan-rekan kelas sekaligus sahabat penulis di Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah / Manajemen Kepemimpinan Pemuda 2018. Penulis mengucapkan terima kasih atas semua yang telah kalian berikan selama penulis menempuh perkuliahan di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, sampai pada penyusunan tesis yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan dan penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Maka dengan penuh kerendahan hati, penulis persembahkan tesis ini semoga bermanfaat dan dapat bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Aamiin Yaa Robbal 'Alaamiin.

Makassar, 12 November 2020

Penulis


Soemitro Emin Praja

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
HALAMAN PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritik	22
1. Organisasi Kepemudaan.....	22
2. Pembangunan Infrastruktur dan Suprastruktur.....	28
B. Tinjauan Konstitusional	32
C. Penelitian Terkait.....	36

D. Definisi Operasional.....	40
E. Kerangka Pikir	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Fokus Penelitian	44
D. Informan	45
E. Jenis dan Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	53
1. Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM)	53
2. Nasyiatul Aisyiah (NA).....	54
3. Pemuda Muhammadiyah (PM).....	59
4. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)	61
5. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).....	63
B. Sejarah Singkat, Tujuan dan Fungsi KNPI.....	67

1. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	67
2. Sejarah DPD I KNPI Sulawesi selatan.....	69
3. Tujuan KNPI	70
4. Fungsi KNPI	72
C. Sajian Data Penelitian.....	73
1. Peran AMM dalam Pengembangan Suprastruktur	74
2. Peran AMM dalam Pengembangan Infrastruktur.....	76
D. Analisis Hasil Penelitian	82
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
 DAFTAR PUSTAKA	91
 LAMPIRAN	

ABSTRAK

Soemitro Emin Praja. Peran Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) dalam Pembangunan Suprastruktur dan Infrastruktur Kepemudaan (Studi kasus KNPI Sulawesi selatan 2019 – 2022) (Dibimbing oleh Dr. Abdul Razak Munir dan Dr. A Lukman Irwan).

Pemuda merupakan sumber daya paling potensial yang diharapkan mengisi berbagai posisi di tengah masyarakat. Karena perannya yang sangat penting maka pemuda diharuskan mampu mempertahankan tradisi dan idealismenya sebagai sebuah identitas. Pembangunan pemuda menjadi program penting bagi setiap negara di dunia, Pemuda selalu dikategorikan sebagai aset terbesar bangsa sekaligus tumpuan harapan dalam menegakkan cita-cita bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran AMM dalam pembenahan suprastruktur kepemudaan serta bagaimana peran AMM dalam pembenahan infrastruktur kepemudaan di KNPI Sulawesi selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) dalam Pembangunan Suprastruktur dan Infrastruktur Kepemudaan di KNPI Sulsel yaitu KNPI Sulsel merespon realitas yang ada, melakukan advokasi dan menggalakkan aksi sebagai wadah perjuangan, kemudian menghidupkan forum-forum komunikasi melalui kegiatan diskusi seperti dialog social kemasyarakatan, kepemudaan dan kebangsaan serta FGD (*Focuss Group Discussion*) yang berbasis local secara berkesinambungan, serta menjadi laboratorium kader sebagai proses upaya regenerasi kepemudaan di Sulawesi selatan dan meningkatkan harmonisasi, soliditas dan sinergitas sebagai upaya merekatkan kemajemukan OKP yang ada di KNPI Sulsel. Saran dalam penelitian ini adalah Ketua umum KNPI Sulsel agar lebih menggalakkan lagi nilai-nilai kepemudaan dari segi Infrastruktur dan Suprastruktur Kepemudaan.

Kata kunci: Peran, Angkatan Muda Muhammadiyah, Infrastruktur, Suprastruktur, Kepemudaan



ABSTRACT

Soemitro Emin Praja. The Role of *Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM)* in Superstructure Development and Youth Infrastructure at KNPI of South Sulawesi (Supervised by Dr. Abdul Razak Munir and Dr. A Lukman Irwan).

Youth is the most potential resource which is expected to fill various positions in society. Because of their foremost role, youth is required to be able to maintain their traditions and idealism as an identity. Youth development is an important program for every country in the world. Youth is always categorized as the nation's greatest asset as well as a foundation of hope in upholding the ideals of the nation. This study aims to determine the role of AMM in reforming the youth superstructure and the role of AMM in improving youth infrastructure at KNPI of South Sulawesi. This research used descriptive qualitative research. The number of informants in this study were 6 people. Data collection techniques in this study were namely observation, interviews, and documentation.

The results showed that the role of AMM in the development of superstructure and youth infrastructure at KNPI of South Sulawesi, namely responding to reality, conducting advocacy and promoting action as a forum for struggle, then reviving communication forums through discussion activities such as social dialogue, youth and nationality and local-based FGDs (Focus Group Discussion) on an ongoing basis, as well as becoming a cadre laboratory as a process of youth regeneration efforts in South Sulawesi and increasing harmony, solidity and synergy as an effort to cement the OKP plurality in KNPI South Sulawesi. The suggestion in this research is that the general chairman of KNPI of South Sulawesi should further promote youth values in terms of infrastructure and youth superstructure.

Keywords: Role, Angkatan Muda Muhammadiyah, Infrastructure, Superstructure, Youth.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemuda merupakan sumber daya paling potensial yang diharapkan mengisi berbagai posisi di tengah masyarakat. Karena perannya yang sangat penting maka pemuda diharuskan mampu mempertahankan tradisi dan idealismenya sebagai sebuah identitas. Dalam masyarakat diperlukan peran pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya bangsa, pondasi kekuatan moral serta agen perubahan ke arah yang lebih baik. Sejarah telah mencatat perjuangan pemuda dengan organisasi Budi Utomo serta peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam upaya merebut kemerdekaan dari penjajahan kolonial. Peran pemuda juga disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 16 yaitu: "Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional". Ada peribahasa yang mengungkapkan bahwa barang siapa menguasai pemuda, maka akan menguasai masa depan (Tilaar, 1991).

Pembangunan pemuda menjadi program penting bagi setiap negara di dunia, Pemuda selalu dikategorikan sebagai aset terbesar bangsa sekaligus tumpuan harapan dalam menegakkan cita-cita bangsa, selain itu ia juga

merupakan bagian penting dari zaman yang diharapkan dapat menjadi *agent of change* (Dewanta dkk, 2008).

Peran dan partisipasi pemuda sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara selalu berusaha untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan karakter pemudanya. Melihat begitu besarnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan, maka pemuda haruslah memiliki wadah yang dapat menampung ide dan gagasan mereka. Oleh karena itu, upaya mewujudkan cita-cita bangsa, para pemuda banyak yang memilih aktif kedalam organisasi kepemudaan yang kemudian dijadikan sebagai wadah penyaluran segala ide dan gagasan, (Wahab dkk, 2011).

Di era saat ini, cukup banyak organisasi kepemudaan yang dapat dijadikan sebagai wadah pengembangan dan penempahan diri dalam membentuk karakter. Contohnya, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi yang konsen didunia usaha dan industri kreatif, organisasi pemuda pecinta alam ataupun organisasi lain yang berdiri di suatu wilayah tertentu seperti di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Salah satu organisasi yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menanamkan nilai dan karakter pemuda adalah organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Selatan. KNPI Sulawesi Selatan sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan telah banyak mencetak pemuda-

pemudi yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat khususnya kepemimpinan pemuda di Sulawesi Selatan.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan, sebagai bukti atas kepekaan dan kepeloporan pemuda dalam menjawab tantangan kedepannya berdasarkan nilai-nilai kesejarahan peran pemuda dalam menggalang semangat persatuan dan kesatuan untuk mengkonsolidasi keanekaragaman potensi, bentuk sinkronisasi dalam sinergitas partisipasi dalam rangka menyukkseskan pembangunan.

Undang-Undang Kepemudaan menyebutkan bahwa pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda yang dilakukan melalui:

1. Peningkatan iman dan takwa;
2. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
5. Peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda;
6. Peningkatan kemampuan hubungan internasional;
7. Peningkatan kemampuan pengelolaan lembaga kepemudaan;
8. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Selain itu, dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kepelajaran, dan Organisasi Kemahasiswaan. Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Apabila diklasifikasikan berdasar motivasi dan tujuan kelahirannya, Organisasi kepemudaan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Organisasi Kepemudaan yang berafiliasi dengan Parpol. Organisasi politik lazimnya memiliki organisasi sayap sebagai sarana afiliasi politik. Organisasi sayap seperti Organisasi kepemudaan ini menjadi alat untuk parpol dalam mengkonsolider anggota dan partisipan yang berafiliasi langsung atau yang dipersiapkan sebagai kader Parpol tersebut. Organisasi Kepemudaan sayap parpol berperan sebagai saluran terhadap minat, bakat, dan aspirasi kaum muda.
2. Organisasi Kepemudaan yang bernaung di bawah Ormas. Ormas atau Organisasi Masyarakat sebagai Organisasi non-pemerintah memiliki ciri umum nirlaba dan dibentuk untuk kepentingan umum. Organisasi Kepemudaan yang bernaung di bawah ormas terbagi

menjadi dua yaitu, organisasi kepemudaan yang lahir atas inisiatif pemuda sendiri dan terlahir atas inisiatif induk Ormas.

3. Organisasi yang berdiri sendiri (Independen). Organisasi Kepemudaan yang independen terlahir atas inisiatif pemuda sendiri dan tidak terkait dengan Parpol dan Ormas manapun.

Dari tiga kategori diatas terhimpun 49 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang bernaung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan perodesasi 2019 – 2022 diantaranya:

1. PW PEMUDA MUHAMMADIYAH SULSEL
2. PD XIX GM FKPPi SULSEL
3. DPD PPAPRI SULSEL
4. BPC GMKI MAKASSAR
5. DPD BM KOSGORO 57 SULSEL
6. BADKO HMI SULSELBAR
7. PW SAPMA PEMUDA PANCASILA SULSEL
8. PD PEMUDA PANCA MARGA SULSEL
9. DEPIDAR WIKARYA INDONESIA SULSEL
10. BM PAN SULSEL
11. DPP PERADAH INDONESIA SULSEL

12. DPD GAMKI SULSEL
13. PEMUDA KATOLIK KOMDA SULSEL
14. PKC PMII SULSEL
15. DPD BANTAENG PEMUDA INDONESIA SULSEL
16. DPD IMM SULSEL
17. BAKORDA FOKUSMAKER SULSEL
18. DPP GEMA KOSGORO SULSEL
19. DPD MAPANCAS SULSEL
20. DPD GEMA MKGR SULSEL
21. PW. FATAYAT NU SULSEL
22. DPD PEMUDA ISLAM SULSEL
23. PW IPPNU SULSEL
24. PW BKPRMI SULSEL
25. GARDA PEMUDA MERAH PUTIH SULSEL
26. DPD GPPI SULSEL
27. PW PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA SULSEL
28. DPD KB PEMUDA JUSTITIA SULSEL
29. PW GP AL WASHLIYAH SULSEL
30. PW IPNU SULSEL

31. SRIKANDI PEMUDA PANCASILA SULSEL
32. DPD IPTI SULSEL
33. DPD GM KOSGORO SULSEL
34. DPD GM KIARA SULSEL
35. DPD GENERASI PEMUDA TRIKORA SULSEL
36. DPD AMPI SULSEL
37. PW IPM SULSEL
38. PW GMP SULSEL
39. DPD PEMUDA DEMOKRAT INDONESIA SULSEL
40. DPW HIMPUNAN PEMUDA AL-KHAIRAT SULSEL
41. DPW GERAKAN PEMUDA KA'BAH
42. DPW GEMA Keadilan SULSEL
43. DPW GARDA BANGSA INDONESIA
44. PW GP ANSOR SULSEL
45. BPD HIPMI SULSEL
46. DPD HMI SULSEL
47. PW NASYIATUL AISYIYAH SULSEL
48. DPD MAHASISWA PEMBANGUNAN INDONESIA
49. PW GMPI SULSEL

Data diatas mengungkapkan satu fakta tentang banyaknya jumlah Organisasi Kepemudaan (secara kuantitas) yang ada di Sulawesi Selatan yang kemudian berhimpun dalam satu wadah perjuangan yang disebut dengan KNPI Sulawesi Selatan. Tetapi jumlah tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan terkait peran aktif dan eksistensi beberapa organisasi kepemudaan dalam peranannya membangun tata kelolah kepemudaan dan pengembangan potensi melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Selain itu yang paling miris adalah masih adanya beberapa organisasi kepemudaan yang keaktifannya hanya muncul ketika momentum perhelatan musyawarah atau kongres KNPI digelar sehingga memberikan image negatif dan kesan tentang adanya organisasi – organisasi spesialis musyawarah khususnya di Sulawesi selatan.

Selain itu, Besarnya peran Organisasi Kepemudaan bukan berarti terlahir tanpa permasalahan. Terdapat indikasi perpecahan gerakan Organisasi Kepemudaan yang terjadi karena: (1) adanya kecenderungan untuk membangun interaksi sosial yang hanya berdasarkan pada moment-moment tertentu bukan karena adanya persamaan misi dan tujuan dalam kebersamaan. Hal ini menyeret banyak Organisasi Kepemudaan kepada fenomena gerakan yang terpecah-pecah dan tidak saling berintegrasi; (2) adanya kecenderungan untuk bersikap pragmatis dalam merumuskan visi dan orientasi gerakan Organisasi Kepemudaan yang menyebabkan terkikisnya sikap independen,

terkuburnya konsistensi, serta hilangnya komitmen antara anggota Organisasi Kepemudaan (Dewanata & Syaifullah, 2008)

Kementerian Pemuda dan Olahraga (2010) menyebutkan berbagai masalah yang kini dihadapi oleh Organisasi Kepemudaan di Indonesia secara umum sebagai berikut:

1. Jumlahnya semakin banyak tetapi tidak diimbangi dengan kualitas SDM-nya.
2. Idealisme pengurus dan anggota mulai terkikis oleh pragmatisme.
3. Cenderung berorientasi ada kepentingan publik dari pada sosial.
4. Belum mampu mandiri dan masih bergantung pada berbagai pihak.
5. Belum mampu berperan maksimal dalam merespon permasalahan sosial
6. Masih berorientasi pada kuantitas dari pada kualitas anggota organisasi.
7. Amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang tidak dijalankan secara konsisten.

Permasalahan-permasalahan diatas bukan tidak mungkin dapat menghambat proses pemberdayaan potensi pemuda dalam kerangka pembangunan bangsa.

Sebuah kewajiban bersama untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Namun, upaya mengatasi masalah dalam pemberdayaan potensi pemuda tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi oleh masyarakat dan pemuda itu sendiri. Tugas pemerintah adalah untuk memiliki kemampuan dalam memberikan yang terbaik untuk pemuda baik dalam infrastruktur, support, hingga bantuan materiil dalam pencapaian pembangunan pemuda yang maksimal. (Adhyaksa Dault, dalam Dewanata & Syaifullah, 2008)

KNPI sebetulnya merupakan cerminan relasi antara negara dan kaum muda, sekaligus sebagai produk dari relasi itu. Membicarakan KNPI dengan mengabaikan variabel negara hanya akan menjelaskan tampak luarnya, sementara realitas terdalam tidak dapat dibaca. Tampak luar itu adalah realitas internal KNPI yang seakan tegak sebagai sosok organisasi yang otonom, padahal tidak, karena KNPI lahir dari kebijakan korporatisme yang kemudian segenap kebijakan strategis dari KNPI menjadi harus mendapatkan persetujuan pemerintah (penguasa). Artinya organisasi atau ormas yang menentang terhadap kebijakan pemerintah dapat dibubarkan atau dibekukan.

KNPI yang merupakan produk dari kebijakan korporatisme tentu tidak mudah untuk melepaskan dari logika pembinaan atau pengendalian. Pembinaan inilah yang sangat kondusif bagi berkembangnya budaya restu. Karena tanpa restu dan dukungan dari pembina tidak akan mempunyai makna dan nihil politik. Budaya restu ini mempunyai implikasi yang sangat dominan.

Orientasi aktivitas pemuda yang memiliki karakter yang kritis akan terkungkung (kooptasi), sehingga tidak mampu melakukan tekanan (pressure) kepada pemerintah dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Fungsinya hanya sekedar saksi dan legitimasi bagi formalisasi ketukan palu yang sudah diputuskan sebelumnya. Forum pengambil kebijakan kehilangan dinamika, karena lebih banyak dikendalikan oleh remote kekuatan di balik layar. Untuk mendapatkan restu dan memenuhi kepentingan politiknya, bagi aktivis mutlak dibutuhkan patronase politik. Sang pemimpin ibarat klien politik yang mencari patronnya yang berfungsi sebagai pelindung, sekaligus kekuatan pendongkrak bagi mobilitas politiknya, Sedangkan sang patron (penguasa) siklien menjadi kepanjangan tangannya, untuk melakukan pembinaan atau pengendalian politik.

Realitas tersebut tidak mudah untuk merubahnya. Kalupun berubah hanya pergeseran personal, baik pada tingkat klien dan patron (penguasa). Klien bisa mencari patron baru bila yang lama sudah tidak berkuasa. Sebaliknya patron juga gampang mencari klien baru, bila yang lama ternyata tidak cakap. Hal tersebut tidak bisa kita nafikkan telah terjadi di tubuh KNPI secara umum dan juga di Sulawesi Selatan, inilah yang menjadi faktor determinan. Soal kualitas, kapabilitas, kapasitas dan integritas pribadi bukanlah sesuatu yang menentukan, meski tetap penting. Dalam kondisi demikian, maka restu politik sang patron termasuk kekuatan finansial menjadi faktor yang paling penting. Sementara forum-forum yang berdimensi intelektual dan kritis dapat

dikatakan hilang dikarenakan komunikasi yang kurang baik antara anggota dan para pemimpinnya.

Mencermati kembali kondisi generasi muda saat ini, maka terkadang muncul rasa prihatin kita yang cukup mendalam. Namun, dilain sisi rasa bahagia itupun masih sering muncul. Betapa tidak, sejuta harapan yang tertumpu pada pundak pemuda menjadi spirit bagi generasi muda itu sendiri dalam membangun kembali bangsa yang seolah sudah terkoyak oleh arus zaman yang seakan tak bersahabat. Wacana tentang peran dan fungsi pemuda semakin banyak diperbincangkan berbagai kalangan. Hal ini merupakan indikasi bahwa peran dan fungsi pemuda dalam segala lini kehidupan sudah patut untuk diperhitungkan dan diberikan ruang. Berkembangnya wacana bahwa peran pemuda sangat besar dalam aktivitas kemasyarakatan telah menjadi satu isu strategis pengembangan pembangunan ke depan.

Oleh karena itu, ada hal penting yang harus menjadi catatan tersendiri bagi generasi muda sekarang ini, yakni generasi muda harus menimbang kembali posisinya, apa yang dapat diperankan dengan mengoptimisasi segenap potensi yang ada. Generasi muda diharapkan mengenali jati dirinya secara tepat. Dalam konteks penentuan jati diri generasi muda, orientasi rasional objektif harus dikedepankan. Jika ini dapat tercapai maka akan lahir generasi yang mampu memberikan sesuatu yang berguna bagi dirinya, lingkungannya, bangsa, negara, kemanusiaan, dan kehidupan.

Pada fase inilah harusnya Angkatan Muda Muhammadiyah sebagai organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI mampu mengambil peran strategis dalam mengembalikan orientasi pemuda yang sesungguhnya, bermodalkan dasar perkaderan dan pengkajian kritis intelektual sebagai pondasi utama pembinaan karakter Angkatan Muda Muhammadiyah diharapkan mampu memberi warna dan corak tersendiri dalam menentukan arah gerakan KNPI di Sulawesi selatan.

Angkatan Muda Muhammadiyah atau yang sering disebut dengan AMM adalah sebuah wadah forum komunikasi dari beberapa organisasi otonom (Ortom) yang ada di Muhammadiyah. Angkatan Muda Muhammadiyah yang dimaksud terdiri dari Nasyiatul Aisyiyah (NA), Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Masing-masing Ortom itu mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri, serta mempunyai program sesuai dengan bidangnya masing-masing. Angkatan Muda Muhammadiyah memiliki semboyan *Fastabiqul Khairat*; berlomba-lomba dalam kebaikan. (Suara Muhammadiyah, 2020).

Sementara dalam kenyataannya dilapangan, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) yang berhimpun di KNPI terkontaminasi dan terkooptasi dengan pola dan skema yang ada, dalam artian bahwa AMM dibebepara kesempatan malah ikut arus dengan gaya organisasi yang lain ketika

menghadapi momentum perhelatan musyawarah di internal KNPI dengan terjebak pada hal hal yang sifatnya pragmatis dan transaksional.

Lebih luas lagi Angkatan Muda Muhammadiyah tidak sedikit yang terjebak dan melarutkan diri dalam pragmatisme, yaitu kepentingan jangka pendek. Fenomena ini dapat ditangkap dari euphoria pendirian partai politik dan juga kegiatan dukung mendukung calon pemilihan kepala daerah tertentu yang dianggap memiliki kedekatan ideologis dan dapat memperjuangkan kepentingan persyarikatan. Partai politik dianggap sebagai kendaraan penting sebagai akses untuk mendapatkan kue pembangunan dari pemerintah atau Negara tanpa memikirkan lebih dalam lagi tentang nilai-nilai moralitas dan misi pembangunan akhlak yang selama ini didapatkan lewat persyarikatan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi dakwah terbesar di Indonesia.

Dalam konteks gerakan ini, banyak tokoh-tokoh Muda Muhammadiyah yang terlibat dalam gerakan yang bersifat pragmatis tersebut sebagai contoh, pendirian PAN dan PMB adalah salah satu cermin yang menonjol dari arus gerakan pragmatis-politik. Di samping kedua partai tersebut, anak-anak Muda Muhammadiyah banyak yang meleburkan dirinya dalam dinamika partai politik yang ada. Imam ad-Daruquthni, Ahamd Rofiq, Ahmad Hanafi Rais, Raja Juli Antoni, adalah termasuk bagian keci kaum Muda Muhammadiyah yang memilih jalan pragmatis politik dalam merealisasikan cita-cita dan platform perjuangannya.

Selain itu, dalam konteks keterlibatan AMM di KNPI juga seringkali terjebak pada paradigma dan gaya berfikir yang menyesatkan dan menumpulkan nalar kritis kader-kader angkatan muda muhammadiyah karena terpengaruh dengan “budaya restu” yang seharusnya jauh dari karakter dan kepribadian kader kader angkatan muda muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu sendiri dikenal dan dikagumi oleh masyarakat dan seluruh elemen yang ada di negeri ini dengan gaya dan karakter kemandiriannya dalam membangun organisasi.

Dalam menjawab berbagai macam persoalan yang terjadi diatas, tentu tidaklah mudah dan tidak membutuhkan waktu yang singkat. Peradaban kepemudaan dan peradaban bangsa harus dibangun diatas nilai – nilai integritas dan moralitas yang kuat oleh seluruh variabel dan komponen yang ada di bangsa ini. Dalam konteks pembangunan kepemudaan ada dua aspek penting yang harus menjadi perhatian serius oleh AMM untuk ditransformasikan kedalam tubuh KNPI Sulawesi selatan sebagai tempat berhimpun anak anak muda di Sulawesi selatan, yaitu pembenahan suprastruktur dan infrastruktur organisasi.

Agenda pembenahan suprastruktur dilakukan melalui proses pengkaderan yang massif, tetapi format pengkaderan yang selama ini dilakukan secara formalistik harus pula ikut dibenahi dibeberapa bagian, seperti Baitul Arqom di Pemuda Muhammadiyah tidak hanya dilakukan sekali setahun,

dibeberapa level, tetapi diikuti dengan pelebagaan pengkaderan rutin semacam kuliah kader yang dilaksanakan bisa selama 6 bulan. Kemudian setiap bulan dihidupkan kajian rutin disemua level kepemimpinan mulai dari skop provinsi sampai dengan pimpinan ranting disetiap kecamatan dan desa dengan kurikulum pembelajaran lengkap mengenai Al-Islam Kemuhammadiyah serta tema-tema tematik lainnya.

Jadi dimasa yang akan datang pemuda muhammadiyah tidak hanya memiliki forum Baitul Arqom yang dilaksanakan dalam jangka waktu hanya 3 - 5 hari dalam setahunnya, tetapi bisa dirasakan setiap minggu dan setiap bulan lewat pengkajian rutin melalui sarana sekolah atau perguruan tinggi milik muhammadiyah yang tersebar diseluruh tanah air Indonesia dan terkhusus di Sulawesi Selatan. Model gerakan ini akan membantu setiap kader pemuda muhammadiyah dan angkatan muda muhammadiyah secara umum untuk meningkatkan kapasitasnya masing masing sebagai usaha untuk mewujudkan "nalar baru gerakan pemuda muhammadiyah". Karena sangat tidak mungkin perubahan sosial bisa terjadi ketika tidak ditopang oleh upaya-upaya pembenahan kapasitas dan peningkatan kualitas kader.

Selanjutnya bahwa infrastruktur yang terwujud dalam struktur gerakan pemuda muhammadiyah yang relatif lebih baik mulai dari ranting sampai dengan pusat dibandingkan dengan organisasi – organisasi kepemudaan lainnya diseluruh Indonesia, memberikan kesempatan kepada pemuda

muhammadiyah untuk melakukan akselerasi atau percepatan berbagai program aksi gerakan dakwah, sosial – politik dan ekonomi serta peran global (internasional) pemuda muhammadiyah.

Dalam hal pembenahan infrastruktur ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian oleh Angkatan Muda Muhammadiyah. Secara konseptual Dicky Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa tidak akan tercipta infrastruktur kepemudaan yang kuat tanpa adanya pendidikan. Sehingga pemuda dan pendidikan menjadi satu topik penting dalam membangun kualitas kepemudaan.

Menurut teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa tujuan perbuatan manusia adalah memaksimalkan kegunaan atau manfaat dirinya kepada orang lain dan sekurang-kurangnya menghindari kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang telah dilakukan, baik itu bagi diri sendiri maupun orang lain. Salah satu upaya yang harus dimiliki oleh pemuda Indonesia untuk memberikan manfaat kepada orang lain adalah mengoptimalkan fungsi dan peran pendidikan.

Perlu diketahui bahwa data ketenagakerjaan di Indonesia tahun 2016 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah lulusan SD dan SD ke bawah mencapai 43,37% lulusan SMP mencapai 38,57% dan lulusan SMA/SMK sebesar 25,09% dari jumlah total angkatan kerja yang mencapai 127,67 juta orang. Berangkat dari situlah, dapat dikemukakan bahwa esensi

dari sebuah pendidikan di Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Manusia hanya merasa bahwa sisi pendidikan disini hanya sebagai “angin yang lewat begitu saja”, sehingga tidak ada rasa atau niatan yang mana akan memunculkan sebuah usaha dari manusia itu sendiri untuk mencari ilmu pengetahuan yang lebih. Penulis sebagai pemuda Indonesia berpendapat bahwa pemuda dan pendidikan layaknya dua koin mata uang yang saling melengkapi.

Menurut T. Jacob bahwa tujuan pendidikan adalah social futuristik maksudnya pendidikan dijadikan sebagai sarana untuk menggerakkan para pemuda supaya peka dan dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat serta pada tujuan akhirnya pendidikan sebagai sarana humaniorisasi yang akan berpengaruh pada tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal's / SDG's). Salah satu pilar dari tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pendidikan. Hal ini dapat dimengerti bahwa pada hakikatnya pendidikan dapat mengarahkan pemuda dari pandangan konservatif menuju pandangan progresif yang pada muaranya menjadikan pemuda tersebut berjiwa aspiratif. Dari segi teknis, perubahan-perubahan sistem dan kurikulum pendidikan juga dapat menunjang efektivitas dalam pembelajaran.

Namun, seluruh hal-hal tersebut akan sia-sia apabila sistem dan kurikulum pendidikan yang ada justru “mengekan” pemuda untuk berekspresi serta mengurung pemuda dalam “jeruji akademisi”. Oleh karenanya pemuda

transformative yang dihasilkan oleh system pendidikan yang sesuai menjadi solusi untuk mewujudkan pemuda milenial yang peduli dan solutif dengan permasalahan-permasalahan sosial. Pemuda harus memiliki ambisi, yaitu ambisi yang mengarah kepada kebaikan. Jika tidak ada ambisi, maka tidak ada dinamika kehidupan, dan tidak adanya pula perubahan-perubahan ke depan sehingga dikhawatirkan jika tidak ada ambisi maka pemuda-pemuda Indonesia akan mengalami degradasi dari segala aspek, termasuk pemikiran serta tanggung jawab. Salah satu ambisi yang baik adalah menjadi pemuda yang berintelektual, berkaraker, dan berbudaya.

Berangkat dari kompleksitas masalah yang diuraikan diatas maka penulis dapat mengidentifikasi pokok pokok permasalahan kepemudaan yang ada di KNPI Sulawesi selatan secara umum dan terkhusus tentang peran Angkatan Muda Muhammadiyah sebagai OKP yang berhimpun di KNPI Sulawesi selatan sebagai berikut:

1. Terjadinya degradasi dan dekadensi gerakan kepemudaan di Sulawesi selatan dikarenakan beberapa organisasi kepemudaan masih berorientasi pada kuantitas dari pada kualitas anggota organisasi. Hal tersebut terkonfirmasi dengan adanya beberapa organisasi kepemudaan yang keaktifannya hanya muncul ketika momentum perhelatan musyawarah atau kongres KNPI digelar sehingga memberikan image negatif dan kesan tentang adanya organisasi – organisasi spesialis Musyawarah di dalam tubuh organisasi KNPI Sulawesi selatan.

2. Adanya budaya restu yang melemahkan mentalitas pemuda dalam bergerak dan berkarya. Dalam konteks keterlibatan AMM di KNPI juga seringkali terjebak pada paradigma dan gaya berfikir yang menyesatkan dan menumpulkan nalar kritis kader-kader angkatan muda muhammadiyah karena terpengaruh dengan “budaya restu” yang seharusnya jauh dari karakter dan kepribadian kader kader angkatan muda muhammadiyah. Hal inilah yang menjadi faktor lemahnya peran Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) dalam merekonstruksi nilai-nilai moralitas kepemudaan di KNPI Sulawesi selatan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, hal yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran AMM dalam pembangunan suprastruktur kepemudaan di KNPI Sulawesi selatan?
2. Bagaimana peran AMM dalam pembangunan infrastruktur kepemudaan di KNPI Sulawesi selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menganalisis dan mengevaluasi peran AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) dalam pembangunan suprastruktur kepemudaan di KNPI Sulawesi selatan.

- b. Untuk menganalisis dan mengevaluasi peran AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) dalam pembangunan infrastruktur kepemudaan di KNPI Sulawesi selatan.

2. Kegunaan

a. Kegunaan praktis

Tulisan ini adalah sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar Magister (strata dua) di bidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah / Manajemen Kepemimpinan Pemuda Program Pascasarjana Unhas.

b. Kegunaan akademis

Sebagai akademisi, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai rujukan akademik dan memberikan kontribusi pemikiran dalam mengetahui dan memahami peran Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) dalam pembangunan suprastruktur dan infrastruktur kepemudaan di DPD I KNPI Sulawesi selatan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teoritik

1. Organisasi Kepemudaan

Organisasi kepemudaan pada dasarnya adalah wadah berhimpun para pemuda yang berkumpul disebabkan adanya persamaan profesi, ikatan primordialisme, keagamaan dan lainnya. Organisasi itu tumbuh dan berkembang sebagai lembaga formal dengan mengutamakan kesadaran dan tanggung jawab sosial dengan semangat dari, oleh dan untuk pemuda. Kegiatannya sangat beragam baik bersifat politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama yang melibatkan khususnya kalangan pemuda dan masyarakat secara umum. Mereka bergerak secara kreatif, dinamis, visioner, inovatif dan produktif sehingga diperlukan pembinaan agar potensinya dapat berkembang dan bermanfaat secara luas untuk kemajuan bangsa dan negara (Imbang Saputra, 2017)

Secara umum organisasi kepemudaan mempunyai beberapa tujuan yaitu mengajak setiap pemuda untuk bersatu berdasarkan kesamaan tujuan, memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan potensi pemuda sehingga pola pikir dan kepekaan mereka terhadap lingkungan sekitarnya dapat berjalan baik, melatih dan mempersiapkan skill pemuda sehingga mampu memenangkan dirinya

dalam persaingan global dan memberikan masukan maupun kritik atas kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat Indonesia.

Sementara secara khusus, berdasarkan kesamaan pandangan dalam mendirikan organisasi, maka setiap organisasi kepemudaan memiliki tujuan khusus seperti memajukan dan membesarkan nama organisasi melalui berbagai kegiatan yang eksistensinya dapat dirasakan pemuda dan masyarakat luas, mengutamakan keadilan dan kesejahteraan anggota organisasi, mendapatkan pengakuan pemerintah dan masyarakat sebagai organisasi legal-formal dan mengadakan kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Organisasi kepemudaan adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak terdidik menjadi anak terdidik. Organisasi kepemudaan ini berdiri bersama dengan visi dan struktur kepemimpinan, budaya dan model aktualisasi ide dan gagasannya. Bentuk dari organisasi ini lebih banyak berkaitan dengan lembaga HMI, IMM, PMII, BEM dan lembaga organisasi kedaerahan serta yang sejenis dari hal tersebut (Rambangeng, 2013).

Pemuda yang terhimpun di dalamnya menjalani proses kaderisasi, interaksi dan uji kemampuan memimpin dengan adanya struktur kepemimpinan yang di tata melalui forum-forum kongres dan pengambilan kebijakan strategis lainnya. Pendidikan dalam sistem perkaderan dan

rekrutmen tercipta melalui proses ideologisasi, prosesnya dengan mengikuti tahapan perkaderan 1, perkaderan 2 dan tahapan selanjutnya perkaderan sosial dan keterampilan lainnya. Dari proses tersebut terjadi konsolidasi pemikiran, pembentukan watak, mental, tradisi dan kemampuan yang lebih dari pemuda yang tidak berorganisasi. Disinilah peran penting organisasi kepemudaan sebagai pembentuk karakter dan kualitas anak muda di Indonesia.

Dalam kepanitiaan anak muda yang tergabung dalam sebuah organisasi kepemudaan terlatih melakukan manajemen kepemimpinan dan koordinasi. Seorang ketua panitia dilatih melakukan koordinasi dengan panitia lainnya, pembagian tugas sehingga tercipta peran masing-masing. Ada yang mencari dana dengan melakukan registrasi para calon penyumbang dan segmen mana yang bisa mensupportnya, ada juga yang melakukan konsolidasi calon peserta dan undangan agar kegiatan terjadi dengan efektif dan efisien, ada juga yang menjadi pengatur pemateri dan penjadwalan kegiatan sesuai kepentingan organisasi, ada juga mengerjakan semuanya, campur aduk sama rasa dengan berbekal manajemen tukang sate, dia yang buat, dia yang masak, dia yang jual dan dia yang bagi bahkan dia yang makan. Ini menjadikan anak-anak aktivis memahami bagaimana proses konsolidasi secara massif terjadi.

Sementara dalam proses penataan kepengurusan mereka akan membagi tugas sesuai bidang garapan, atau sesuai kebutuhan struktur

pengurus. Tidak selamanya sesuai profesi karena pemikiran lebih banyak berorientasi strategis seyogyanya sebuah kelembagaan. Penentuan pengurus dan setelah terbentuk, ada yang bersifat kolektif dengan memasukkan semua faksi yang berbeda, ada juga yang dominan satu kelompok, keduanya masing-masing memiliki keuntungan.

Jika organisasi dibentuk dari sisi politik, maka kepengurusan yang bersifat kolektif akan membentuk kekuatan eksternal yang baik namun jika gagal konsolidasi internal akan terjadi perpecahan sementara ketunggalan kepengurusan sehingga tidak terjadi proses dialogis dengan semua komponen di dalamnya, kepengurusan akan lemah keluar baik konsolidasi isu maupun pressur gerakan. Sementara pada konteks eksternal akan ada banyak kritikan, disini organisasi akan banyak mengurus urusan dapur karena banyaknya kritikan yang sifatnya ke dalam.

Berbeda dengan organisasi perkaderan model apapun strukturnya akan selalu melihat kepentingan logika perkaderan. Jika kepengurusan sifatnya kolektif kolegal maka akan terbentuk banyak kader pemimpin hasil kepengurusan sebab banyaknya terlibat dalam berbagai isu strategis melibatkan lembaga. Sementara untuk konteks kepengurusan yang sifatnya terbatas dan sempit akan membuat organisasi lebih konsen ke internal karena sedikitnya personil. Meski kelihatan ideal konsep ini namun mewujudkan kepemimpinan yang baik dan kuat sulit tercapai sepenuhnya. Selanjutnya dalam berbagai aktivitas keorganisasian isu-isu

yang berkembang adalah, isu sosial, lingkungan, pendidikan, hukum, keagamaan dan seluruh komponen yang berkaitan dengan sosial politik. Ini isu dominan dari seluruh organisasi kepemudaan yang pernah penulis amati. Aktivistis mahasiswa telah dikonstruksi untuk menjadi *agent of change* (kelompok perubahan), *social of control* (kontrol sosial) atas penyimpangan dan yang terakhir *moral of force*, membangun tatanan moralitas dilihat dari peran sosialnya. (Lahur, 1987)

Aktivistis kepemudaan, mahasiswa yang tidak peka terhadap situasi sosial terkini akan dikecam tidak aktif, pasif dan dianggap membangkang dari aliran pemikiran dasar kelembagaan. Bahkan aktivis yang tidak kritis hanya selalu dilihat dari sisi pragmatis sehingga mahasiswa mau tidak mau harus mengarahkan seluruh kajian dan aspek progresnya pada perjuangan sosial kemasyarakatan. Untuk menunjang perjuangan tersebut maka mahasiswa menguatkan training politik, advokasi, sosial pendidikan bahkan langsung melakukan studi kasus. Semua proses konsolidasi pengetahuan tersebut menempatkan kemampuan mahasiswa diarahkan pada aspek kemampuan sosial, bagaimana mengamati proses politik, membentuk pola gerakan dan meresponnya secara bijak dengan bentuk aksi, selebaran maupun diskusi yang meminta semuanya bertumpu pada isu-isu sosial politik.

Atas proses awal perkaderan dan konsolidasi sosial baik dalam bentuk aktivitas di kepengurusan maupun kepanitian semuanya memaksa

cara pandang mahasiswa harus menjadi manusia sosial secara utuh. Analisa kasus tersebut, proses perkaderan dan rekrutmen awal membentuk kader ideologis sesuai pandangan organisasi. proses ini dengan menghadirkan materi-materi penunjang baik penegasan idealisme perjuangan lembaga, arah politik maupun penguatan analisis soal-soal yang berkaitan dengan gerakan kepemudaan. semua mengarahkan pada arah yang sangat ekstrim yakni gerakan kepemudaan dan tanggungjawab sosial yang sifatnya konsolidatif.

Disisi lain desain kepengurusan dan isu berkembang menjadi ditentukan dari sisi perjuangan sosial, semua isu kepengurusan adalah merupakan manifestasi roh gerakan sosial bahkan model yang dikembangkan di dalam struktur menempatkan logika ANSOS (analisis sosial) menjadi dasarnya dengan muatan teoritik Marx, peran para nabi atau teori sosial perubahan.

Teori Darwin yang sifatnya evolusioner sedikit banyak tidak menjadi menarik dalam diskursus kepengurusan maupun pembentukan watak kader. Kondisi ini menjauhkan anak muda, mahasiswa semakin tidak memahami ilmu-ilmu eksakta. Anda akan mudah menemukan aktivis pergerakan tidak tau rumus matematika meski tetap ada tetapi jumlahnya terbatas dibanding pengetahuan sosial yang sangat menonjol. Bahkan banyak aktivis yang sebelum bergabung dalam organisasi kepemudaan

yang punya pengetahuan eksakta seperti matematika menjadi sedikit demi sedikit tertutupi oleh kajian sosial, sampai akhirnya tidak diingat lagi.

Kajian dan ranah serta peran organisasi kepemudaan itulah yang membuatnya jauh dari rumus eksakta padahal ini juga penting dalam kehidupan apalagi jika kita memasuki sepenuhnya era profesional tahun 2015-2025. Peran organisasi membuat seluruh komponen terarah kesana, sementara tradisi yang berkembang memang sudah demikian adanya, sudah menjadi mutlak diskursus sosial menjadi domain utamanya. Kondisi tersebut membuat nalar eksakta dalam kepengurusan di bungkam, mereka yang memiliki bakat eksakta harus berfikir, 1. meninggalkan organisasinya, 2. tetap di organisasinya tapi mengabaikan bakat eksaktanya, 3 tetap diorganisasinya dengan mengdepankan kajian-kajian eksakta yang pasti tidak akan menarik bagi yang lain. (Kusuma, 2011)

Hal yang ketiga dari muatan di atas, orang yang punya kemampuan ilmu eksakta namun tidak punya penampungan harus membangun tradisi sendiri dalam organisasi, membuat kelompok diskursus di luar lembaga atau membantuk lembaga kekaryaan minimal meredam ketiadaan arah penguatan kemampuan ilmu eksakta dalam organisasi.

2. Pembangunan Infrastruktur dan Suprastruktur Kepemudaan

Infrastruktur pada umumnya diartikan sebagai pembangunan fisik, namun di dalam dunia politik makna ini diartikan sebagai lembaga di masyarakat tertentu di negara yang terdiri atas lembaga swadaya

masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat (Ormas), partai politik, media massa, kelompok kepentingan tokoh politik dan lain-lain yang bergerak independen. Karena infrastruktur merupakan organ yang penting demi kelangsungan hidup sebuah daerah.

Pembangunan infrastruktur akan menciptakan beberapa yang kita perlukan seperti: menciptakan lapangan kerja, membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan merupakan sebuah langkah yang besar menuju pemerataan ekonomi. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, sebuah daerah pun dapat menghidupi dirinya sendiri.

Suprastruktur ditunjukkan dengan kenegaraan. Suprastruktur merupakan suatu cara para anggota masyarakat berpikir, melakukan konseptualisasi, menilai dan merasa, sebagai lawan kata dari apa yang mereka lakukan secara aktual. Kalau struktur merujuk pada perilaku, maka suprastruktur merujuk pada pikiran. Berkaitan dengan suprastruktur ini adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia.

Meski tujuan infrastruktur dan suprastruktur berbeda, hubungan suprastruktur dan infrastruktur adalah untuk saling melengkapi dan mendukung untuk bisa menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk rakyat. Ketika suprastruktur politik bertugas untuk membuat dan mengawasi berjalannya peraturan serta kebijakan negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, infrastruktur politik menjalankan

peraturan kebijakan yang dibuat, dimana dari situ akan muncul aspirasi-aspirasi baru yang bisa disampaikan pada suprastruktur politik yang selanjutnya akan berguna untuk memperbaiki peraturan dan kebijakan yang ada.

Infrastruktur sebagai sebab yang dapat mengatur kegiatan produksi sedangkan peran suprastruktur (lembaga-lembaga politik, hukum, agama, pikiran, filsafat, moralitas) yang menjadi akibat dalam kegiatan produksi. Untuk menjelaskan adanya perubahan sosial akibat dari dorongan oleh perubahan-perubahan dalam produksi sistem. Sebaliknya pada struktur yang akan tetap menjaga sistem produksi.

Yang manakah yang harus diutamakan infrastruktur atau suprastruktur? Menurut pandangan beberapa ahli keduanya harus diutamakan. Tetapi yang lebih diutamakan ialah infrastruktur, karena infrastrukturnya yang menciptakan lapangan kerja, membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan merupakan sebuah langkah yang besar menuju pemerataan ekonomi. Dengan pemerataan ekonomi maka masyarakat pun akan mengalami hidup yang lebih baik lagi.

Menurut Hasyim Ali Imran (Juni 2014) dalam teori politik Suprastruktur Politik yaitu pihak-pihak yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Pihak yang demikian, sejauh dapat dicatat terdiri dari: 1). Lembaga Tinggi Negara: Presiden; DPR, MPR, MK, MA, KY; 2) Lembaga

Independen Negara: KPU, KPI, Komisi Perempuan, dll komisi.; 3) Lembaga Legislatif: DPRD I, DPRD II; 4) Lembaga-lembaga pemerintah setingkat kementerian kebawah: kementerian, dirjen; badan, lembaga, direktorat; dinas, kecamatan, kelurahan; 5) UPT-UPT: Misal: Bendungan/pintu air Katulampa; dan 8) Lembaga-lembaga Parpol: Parpol yang sudah jadi anggota legislatif.

Sementara *Infrastruktur Politik* berarti pihak-pihak yang tidak atau tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Lembaga-lembaga seperti ini diantaranya adalah –Lembaga Ngo: LSM-LSM; -Lembaga Asosiasi/Serikat-serikat: SBI, FBR dll; -Parpol yang belum jadi anggota legislatif seperti kontestan pertama dalam pemilu legislatif; -Media Massa (by internet) seperti detik com oke zone, dll; surat kabar; majalah; televisi; radio siaran; dan anggota/tokoh masyarakat, individual atau mewakili kelompok. (Kantaprawira, 1988 :54).

B. Tinjauan Konstitusional

1. Undang-Undang No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

Hasil dari dialog pemuda Asean dan Eropa dalam “ *ASEAN YOUTH DIALOGUE*” di Brunei Sri Begawan mendefinisikan pemuda dengan batasan umur 18 sampai 25 tahun. Sedangkan Malaysia membatasi pemuda dengan usia 15 sampai 40 tahun. Di Australia, pemuda adalah mereka yang berumur 15 sampai 25 tahun. Berdasarkan *International Youth Camp* definisi pemuda adalah mereka yang berumur 18 sampai 27 tahun. Setiap negara dan lembaga dapat menentukan sendiri definisi pemuda bagi negaranya sesuai dengan situasi dan pembuatan kebijakan publik disana. Dr. Daoed Joesoef mendefinisikan pemuda sebagai sebuah generasi dalam suatu bangsa yang karena tingkat usia, fungsi dan sifat khasnya merupakan angkatan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa (GPPA'45, 1990)

Perbedaan definisi pemuda di dunia turut mempengaruhi Indonesia. Akhirnya pemerintah melalui UU No.40 Tahun 2009 memutuskan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun (pasal 1 Angka 1 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan). Hal tersebut telah

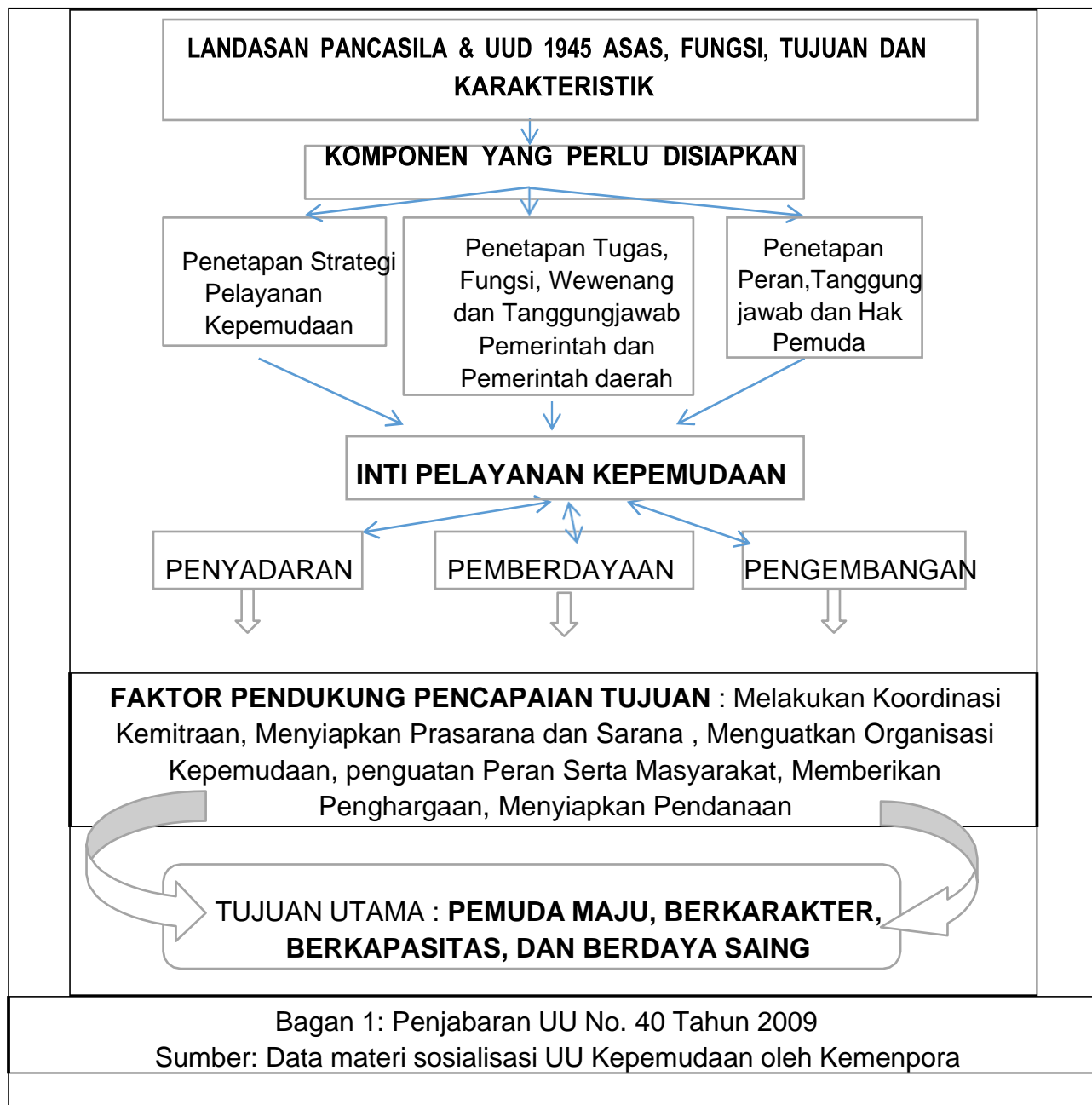
dipertimbangkan dengan melihat fase-fase pertumbuhan manusia menurut aspek sosiologis yuridisnya.

Tabel 1. Fase Pertumbuhan Manusia dalam Aspek Sosiologis Yuridis

Fase	Usia	Perundang-Undangan
Fase yang menitikberatkan pada pembinaan, pengaturan dan pengawasan	Usia 0 < 16 tahun	UU tentang perlindungan anak
Fase yang menitikberatkan pada pemberdayaan, & pengembangan	Usia 16 < 30 Tahun	UU tentang Kepemudaan
Fase Kemandirian dan kematangan	Usia 30 tahun keatas	Seluruh perundang-undangan yang terkait dengan pembagunan sumberdaya manusia

Sumber : Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2010

Undang-undang tentang kepemudaan No. 40 Tahun 2009 dibuat sebagai respon pemerintah terhadap problematika kepemudaan di Indonesia yang semakin kompleks sehingga memerlukan regulasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam membangun kepemudaan. Dengan adanya regulasi tersebut, cita-cita untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing diharapkan akan semakin cepat tercapai. Undang-undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan memiliki 16 bab dengan 54 pasal dan 67 ayat. Substansi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah:



Merancang dan membuat kebijakan publik tentang kepemudaan merupakan salah satu langkah penting pemerintah dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan kepemudaan. Apabila sebelumnya belum terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur

tentang eksistensi pemuda, pada tahun 2009 pemerintah lewat Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah berhasil menerbitkan Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan yang selanjutnya disingkat UU Kepemudaan. Garis besar UU tersebut melingkupi jaminan kepastian hukum tentang apa yang harus dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pemuda agar pemuda bisa memiliki kapasitas dan daya saing.

Selain itu, inti UU Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda sebagai bentuk pelayanan terhadap pemuda serta menjamin sumber pendanaan bagi program pembangunan kepemudaan, dan sasaran pembangunan kepemudaan adalah pemuda sebagai individu, kelompok, dan lembaga.

Dalam UU Kepemudaan disebutkan bahwa pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun (pasal 1 angka 1 UU No. 40/2009 tentang kepemudaan). Selanjutnya OK dalam UU ini didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemuda-pemuda yang memiliki kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan pemuda yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.

C. Penelitian Terkait

Berdasarkan pencarian kajian pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait masalah yang akan dibahas oleh penulis. Tujuan dengan adanya kajian pustaka ini digunakan untuk menghindari adanya tindakan plagiarisme dan menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan antara lain.

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Erwin Wijaya, (2020)	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Dalam Pengembangan Potensi Usaha Berbasis Digital Oleh DPD I KNPI Sulawesi selatan.	Hasil penelitiannya berbicara tentang Memahami kompetensi literasi digital organisasi kepemudaan dalam usaha berbasis digital di DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan dan juga menjelaskan potensi usaha berbasis digital organisasi kepemudaan serta Mengetahui upaya pemberdayaan organisasi kepemudaan dalam usaha berbasis digital di DPD I KNPI Provinsi Sulawesi selatan.	Dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menguraikan tentang masalah masalah yang diteliti.	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode yang digunakan adalah metode penelitian b. Kualitatif Objek penelitian tentang organisasi KNPI Sulsel c. Lokasi penelitian bertempat di Makassar 	Fokus penelitian berbicara tentang program usaha berbasis digital.
2.	Rizki Muhammad Ramdhan, (2018)	Peranan Kepemimpinan Organisasi Kepemudaan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa.	mengkaji peranan organisasi kepemudaan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa, diantaranya mendeskripsikan	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Objek penelitian terkait KNPI b. Metode penelitian adalah kualitatif c. Metode 	<ul style="list-style-type: none"> a. Aspek yang diteliti fokus pada partisipasi pemuda di bidang politik b. Lokasi penelitian

		(Studi deskriptif pada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi).	bentuk program, pemikiran dan model kepemimpinan KNPI, mengkaji proses interaksi sosial KNPI dengan masyarakat desa, mengidentifikasi kendala yang dialami KNPI, serta menggali faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat desa di kecamatan Nagrak.		Pengumpulan data Menggunakan kuesioner, observasi, dokumentasi dan wawancara.	di kabupaten sukabumi
3.	Tajuddin Nur, (2017)	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Program AKUNU GP Ansor Lampung).	Hasil penelitiannya berbicara tentang Program kemandirian organisasi sebagaimana diamanatkan pada kongres GP Ansor tahun 2015 sekaligus menjadi acuan dalam Rapat Kerja Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada 2016.	Dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menguraikan tentang masalah masalah yang diteliti.	Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Fokus penelitian lebih kepada program peningkatan kesejahteraan yang ada di organisasi GP Ansor yang merupakan organisasi milik NU.

4.	Misbawati, (2017)	Strategi Komunikasi Dakwah di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gowa.	Hasil penelitiannya yaitu memberikan gambaran tentang kondisi aktual kepengurusan KNPI di Kabupaten Gowa, terkait dinamika dan problematika yang dihadapi pemuda di Kabupaten Gowa. Selain itu juga mendeskripsikan tentang strategi komunikasi dakwah di KNPI kabupaten Gowa yang juga banyak mengupas terkait permasalahan-permasalahan organisasi.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan komunikasi dan teknik purposif sampel untuk memperoleh informan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Objek penelitian terkait KNPI. b. Metode penelitian adalah kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian fokus kepada KNPI di Kabupaten Gowa. b. Penelitian berbicara tentang dakwah dan ilmu komunikasi.
----	-------------------	---	---	--	--	---

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang diajukan, terlebih dahulu penulis mengidentifikasi dan mengemukakan kata-kata kunci dalam judul penelitian ini:

1. Angkatan Muda Muhammadiyah atau yang sering disebut dengan AMM adalah sebuah wadah forum komunikasi dari beberapa organisasi otonom (Ortom) yang ada di Muhammadiyah. Angkatan Muda Muhammadiyah yang dimaksud terdiri dari Nasyiatul Aisyiyah (NA), Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
2. Suprastruktur merupakan suatu cara para anggota masyarakat berpikir, melakukan konseptualisasi, menilai dan merasa, sebagai lawan kata dari apa yang mereka lakukan secara aktual. Kalau struktur merujuk pada perilaku, maka suprastruktur merujuk pada pikiran. Berkaitan dengan suprastruktur ini adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia atau lebih sederhana dapat dibahasakan sebagai upaya pembentukan moralitas, menciptakan karakter dan peneguhan identitas.
3. Infrastruktur pada umumnya diartikan sebagai pembangunan fisik, namun di dalam teori sosial makna ini diartikan sebagai lembaga di masyarakat tertentu di negara yang terdiri atas lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat (Ormas), partai politik,

media massa, kelompok kepentingan tokoh politik dan lain-lain yang bergerak independen karena infrastruktur merupakan organ yang penting demi kelangsungan hidup sebuah daerah. Secara konseptual Dicky Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa infrastruktur kepemudaan yang kuat adalah yang mampu melahirkan lapangan pekerjaan, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 hingga 30 tahun.
5. KNPI Sulawesi Selatan adalah organisasi yang mewadahi pemuda-pemudi terbaik dan organisasi kepemudaan di Sulawesi selatan.

E. Kerangka Pikir

